BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi global kini berkembang pesat, namun dunia masih menghadapi beberapa tantangan serius yang mengancam kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan (P. Maharani et al., 2024). Tantangan tersebut antara lain tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang kompleks serta saling berkaitan, seperti kemiskinan, penipisan sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, perubahan iklim, bencana alam maupun buatan manusia, dan konflik yang semakin meluas, sehingga pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi prioritas utama (United Nations, 2025). Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan karena dapat menghambat keseimbangan ekosistem global dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama agar upaya pembangunan dapat berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi tercapainya keberlanjutan jangka panjang.

Upaya mewujudkan keberlanjutan jangka panjang menjadi dasar untuk menanggapi permasalahan global tersebut, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan komitmen global yang harus dicapai pada tahun 2030 dalam menghadapi tantangan dunia dan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Adila et al., 2025). Tujuan utama dari SDGs adalah menjadi landasan kebijakan yang berorientasi pada bukti dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang berfokus untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan (Parmentola et al., 2022). Tujuan tersebut mendorong penetapan SDGs sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs yang ditetapkan pada tahun 2000, karena dinilai belum mampu mengatasi tantangan secara memadai (Lai et al., 2025).

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memuat 17 tujuan dengan lebih dari 230 indikator pembangunan global yang harus dicapai pada tahun 2030 dengan menargetkan 169 negara (Guo et al., 2022). Adapun 17 tujuan global yang diadopsi PBB untuk mendorong pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, meliputi pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan (Dutt, 2022). Transformasi ini fokus pada integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan pada masa kini tetap menjaga keberlanjutan sumber daya manusia, sosial, dan lingkungan untuk generasi yang akan datang (Sun et al., 2022).

Keberlanjutan sumber daya manusia, sosial, dan lingkungan menjadi acuan bagi negara dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan tujuan SDGs. Sebagai bentuk komitmen nasional terhadap pencapaian SDGs, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59, di mana Pasal 1 mengatur keterlibatan berbagai pihak selain pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023). Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan tercatat untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan tahunan (Prihandono & Yuniarti, 2023). Pada agenda *Development Goals Summit* (DGS), pemerintah juga menegaskan bahwa pencapaian SDGs di tingkat regional masih menghadapi kesenjangan pembangunan, sehingga organisasi di negara berkembang seperti Indonesia perlu memperhatikan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan untuk mencapai target SDGs 2030 (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023).

Setelah terbitnya POJK No. 51/POJK.03/2017, OJK merilis Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk sektor perbankan pada akhir 2018, yang menandai dimulainya implementasi keuangan berkelanjutan pada 1 Januari 2019, khususnya bagi bank BUKU-IV dan bank asing (Permadani et al., 2022). Selanjutnya, OJK menerbitkan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

sebagai panduan tambahan bagi emiten dan perusahaan publik, terutama sektor non-keuangan dalam menerapkan bentuk dan isi laporan tahunan, termasuk laporan keberlanjutan, sekaligus mempertegas standar pengungkapan yang harus dipenuhi (Ikram et al., 2024). Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan di Indonesia.

Implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis tidak hanya membantu pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tujuan global. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan lingkungan yang baik, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait pencapaian SDGs secara lebih jelas dan transparan (D. A. Maharani & Rahayuningsih, 2025; N. Sari et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, SDGs menjadi panduan yang mendorong perusahaan untuk ikut menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan cara memberikan pengungkapan SDGs yang lebih jelas dan transparan.

Pengungkapan SDGs menjadi aspek penting bagi perusahaan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, yang menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pengungkapan SDGs yang transparan dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memenuhi tuntutan mereka akan informasi yang lebih komprehensif mengenai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan global (Fonseca et al., 2023). Namun, kualitas pengungkapan SDGs antar perusahaan sangat bervariasi, baik dari segi metode, kedalaman, maupun kelengkapan data yang disajikan (Schena et al., 2025). Beberapa perusahaan hanya melakukan pengungkapan secara simbolis untuk membangun citra positif, sementara yang lain menyajikan data kuantitatif, target, dan capaian yang lebih substantif dalam *sustainability report* mereka (Manes-Rossi & Nicolo', 2022). Variasi pengungkapan tersebut menunjukkan perlunya metode

yang tepat untuk menilai sejauh mana perusahaan benar-benar mengintegrasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam praktik keberlanjutannya.

Kualitas pengungkapan SDGs dapat diukur dengan beberapa metode, salah satunya adalah menggunakan indeks pengungkapan berbasis *content analysis* terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Pengukuran ini dilakukan dengan menyusun daftar indikator pengungkapan SDGs yang relevan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan lembaga internasional independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan global untuk membantu organisasi melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara transparan dan akuntabel (de Villiers et al., 2022). Berdasarkan indikator tersebut, penilaian dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan secara kualitatif, skor 2 jika suatu item diungkapkan secara kuantitatif, dan 0 jika tidak diungkapkan, kemudian seluruh skor dijumlahkan dan dibagi dengan total indikator sehingga menghasilkan persentase tingkat pengungkapan SDGs (Arifianti & Widianingsih, 2023).

Pengungkapan SDGs hingga tahun 2025 masih belum optimal. Berdasarkan SDG *Index* 2025, Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 167 negara dengan skor 70,2 atau sekitar 70% dari target SDGs (SDG*Index*, 2025). Posisi ini menunjukkan bahwa pencapaian dan pengungkapan SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, laporan *Voluntary National Review* (VNR) 2025 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa sekitar 62% target SDGs telah berada pada jalur pencapaian, dengan 152 dari 244 indikator yang dapat diukur dinyatakan *on track*. Namun, capaian ini juga mengindikasikan bahwa sekitar 38% indikator lainnya belum berada pada jalur yang diharapkan (BAPPENAS, 2025). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan ketersediaan dan kualitas data serta ketimpangan capaian antar-dimensi dan kelompok masyarakat. Meskipun *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan didukung oleh

kolaborasi lintas sektor, ketidakseimbangan capaian antar indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pelaporan SDGs belum berlangsung secara merata dan konsisten.

Ketidakseimbangan pelaksanaan dan pelaporan tersebut tercermin dalam fokus evaluasi laporan *Voluntary National Review* (VNR) 2025 yang memuat penilaian atas kemajuan implementasi SDGs di Indonesia. VNR 2025 memfokuskan pelaporan pada SDG 3 (kehidupan sehat dan sejahtera); SDG 5 (kesetaraan gender); SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); SDG 14 (ekosistem lautan); dan SDG 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan) (BAPPENAS, 2025). Fokus pelaporan ini mengindikasikan bahwa kemajuan dan pengungkapan SDGs di Indonesia belum berlangsung secara seimbang pada seluruh tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan, khususnya dalam kualitas data, konsistensi pelaporan, dan pemerataan perhatian antar-aspek keberlanjutan, agar pengungkapan SDGs tidak terpusat pada aspek ekonomi semata.

Fokus pengungkapan cenderung pada aspek ekonomi, sedangkan aspek lingkungan dan sosial masih kurang mendapat perhatian (Megawati & Pratama, 2024). Kondisi ini tercermin pada perusahaan yang bergerak di sektor perindustrian. Sektor perindustrian umumnya memproduksi dan menyediakan berbagai produk atau layanan yang digunakan oleh industri lain, bukan oleh konsumen secara langsung. Produk yang dihasilkan biasanya berupa barang jadi, seperti peralatan kedirgantaraan, perlengkapan pertahanan, material bangunan, mesin, hingga perangkat kelistrikan. Selain itu, sektor ini juga mencakup layanan komersial, misalnya percetakan, pengelolaan lingkungan, serta penyedia barang dan jasa industri, serta layanan profesional seperti jasa kepegawaian dan riset yang berfungsi mendukung kebutuhan operasional berbagai industri (IDX, 2025). Proses produksi produk dan penyediaan jasa di sektor perindustrian dapat berdampak pada lingkungan dan aspek sosial dari aktivitas perusahaan tersebut. Penggunaan energi, bahan penunjang, dan operasional produksi berpotensi memengaruhi ekosistem, emisi, dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan operasional yang baik sangat penting agar dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat

diminimalkan.

Melihat pentingnya peran sektor ini terhadap keberlanjutan, tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan-perusahaan perindustrian menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Sejalan dengan hal tersebut, Wicaksono (2023) menganalisis tingkat pengungkapan SDGs pada seluruh perusahaan yang termasuk dalam delapan sektor berbeda di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Meskipun cakupan penelitian mencakup seluruh sektor, temuan menunjukkan bahwa sektor perindustrian menjadi salah satu sektor yang paling menonjol karena memiliki tingkat pengungkapan SDGs yang tergolong rendah. Pada penelitian tersebut, sektor perindustrian diwakili oleh dua perusahaan besar, yaitu Astra International Tbk. (ASII) dan United Tractors Tbk. (UNTR). Berdasarkan hasil *matrix coding*, kedua perusahaan menunjukkan tingkat pengungkapan yang masih terbatas. Pada aspek *business action*, ASII hanya mengungkapkan 70 item (12%), sementara UNTR hanya 38 item (7%) dari total indikator yang digunakan dalam kerangka SDGs. Rendahnya pola ini juga tercermin pada tingkat pengungkapan target SDGs, di mana ASII hanya mengungkapkan 39 target (27%) dan UNTR 28 target (19%). Jika dianalisis per tujuan, perusahaan perindustrian cenderung lebih fokus pada SDG tertentu seperti SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan); SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan); dan SDG 13 (Aksi Iklim), sementara pengungkapan pada tujuan lainnya masih sangat terbatas. Misalnya, pada SDG 12, ASII hanya mengungkap enam item dan UNTR tiga item terkait pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, dan praktik produksi berkelanjutan, sedangkan pada SDG 13, ASII dan UNTR masing-masing hanya mengungkap empat dan dua item terkait mitigasi perubahan iklim dan adaptasi lingkungan.

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Triwibiansyah et al. (2025) melaporkan bahwa ASII melaksanakan sejumlah program lingkungan berskala besar yang tergabung dalam *Astra Green Company* atau Astra Hijau. Pada tahun 2022, ASII melakukan penanaman ribuan pohon dan mangrove di berbagai wilayah, antara lain 2.625 pohon di Jawa Barat, 15.500 mangrove di Karawang, serta pelestarian ratusan pohon buah langka di Taman Nasional

Cibodas. Kegiatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 melalui konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, termasuk penanaman 260 pohon Trembesi di Jakarta dan lebih dari 20.000 pohon di berbagai daerah untuk pemulihan lahan terdampak bencana. Pada tahun 2024, skala program diperluas dengan penanaman lebih dari 23.000 pohon di beberapa provinsi, disertai narasi kontribusi terhadap pengurangan polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan perlindungan ekosistem lokal.

Sejalan dengan masifnya aktivitas lingkungan tersebut, Hamada et al. (2025) menganalisis kajian terhadap laporan keberlanjutan ASII periode 2021–2024 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dimensi ekonomi (*profit*) masih menjadi aspek yang paling dominan dan terukur, sementara dimensi sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) cenderung disajikan secara simbolik serta belum konsisten menggunakan indikator yang mendalam sesuai dengan prinsip *triple bottom line* dan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas pelaksanaan program keberlanjutan dan kualitas pengungkapan SDGs, khususnya pada dimensi sosial dan lingkungan.

Ketidakseimbangan kualitas pengungkapan SDGs tersebut tidak hanya terjadi pada ASII, tetapi juga tercermin secara lebih luas pada perusahaan manufaktur sektor perindustrian yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil perhitungan kualitas pengungkapan SDGs menggunakan skor *Total Accountability Indicator* (TAI) terhadap 35 perusahaan sektor perindustrian periode 2022–2024, rata-rata kualitas pengungkapan SDGs hanya sebesar 41%, dengan rentang nilai antara 19% hingga 60% di antara perusahaan sampel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan manufaktur sektor perindustrian belum mengungkapkan informasi terkait SDGs secara lengkap, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan SDGs yang disajikan masih belum dapat dikategorikan berkualitas, karena sebagian besar item belum diungkapkan secara terukur dan dapat diverifikasi oleh para pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor perindustrian memiliki aktivitas yang berpotensi besar terhadap lingkungan dan secara teori dituntut memiliki komitmen keberlanjutan yang tinggi, tetapi tingkat pengungkapan SDGs yang disajikan perusahaan masih tergolong rendah. Hal ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara tuntutan agenda pembangunan berkelanjutan dan praktik yang dijalankan perusahaan. Selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi dampak lingkungan, serta memberi manfaat sosial. Jika upaya tersebut dapat diungkapkan secara transparan, perusahaan dapat menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan yang seimbang pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaporan yang tersedia, sehingga tingkat pengungkapan yang dihasilkan tetap tergolong rendah.

Fenomena rendahnya kualitas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta belum optimalnya implementasi dan pelaporan SDGs, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Arum & Farida (2023) menjelaskan bahwa faktor yang dapat memengaruhi SDGs adalah *green accounting*, *environmental performance*, *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) dan *environmental disclosure*. Kemudian, menurut H. Zhang et al. (2024) SDGs dipengaruhi oleh pelaporan *green innovation*. Adapun menurut Octora & Amin (2023) *stakeholder pressure* berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan, di mana kualitas pengungkapan SDGs merupakan bagian dari laporan keberlanjutan perusahaan. Pada penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah *environmental performance*, *green innovation*, *Material Flow Cost Accounting* (MFCA), dan *stakeholder pressure*.

Environmental performance merupakan aspek penting dalam mendukung tercapainya tujuan, khususnya pada tujuan-tujuan yang berfokus pada lingkungan seperti SDG 6 (air bersih dan sanitasi); SDG 7 (energi bersih dan terjangkau); SDG 11 (kota dan komunitas berkelanjutan); SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab); SDG 13 (penanganan perubahan iklim); SDG 14 (ekosistem laut); dan SDG 15 (ekosistem daratan). *Environmental performance* dapat diwujudkan melalui penerapan praktik

ramah lingkungan, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam operasional bisnis (Raman et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, menurut N. Sari et al. (2025), D. A. Maharani & Rahayuningsih (2025), dan Rifai & Ramadhan (2025) menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs. Hasil serupa juga ditemukan oleh Farda et al. (2024) serta Handayani & Sari (2025), yang menegaskan bahwa perusahaan dengan *environmental performance* tinggi cenderung lebih berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, hasil penelitian Arum & Farida (2023) serta Ridwan et al. (2025) melaporkan bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada beberapa perusahaan.

Green innovation atau inovasi hijau sebagai kunci pencapaian SDGs, melalui adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, berperan penting dalam mendukung SDG 7 (energi bersih); SDG 9 (industri dan inovasi); SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab); dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim) (Amin et al., 2025). Mahmood et al. (2024) menyatakan bahwa penciptaan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendorong praktik keuangan dan sosial yang berkelanjutan, serta memberikan solusi yang berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi tantangan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Wang et al. (2022), Liao et al. (2022), dan Dhani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa *green innovation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs. Hasil serupa juga ditemukan oleh Zhen et al. (2025), Yin & Liu (2025), serta Du et al. (2024), yang menegaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *green innovation* tinggi cenderung lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, meningkatkan reputasi, dan memperkuat *environmental performance* serta sosialnya. Namun, temuan lain menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten. Islam (2025) menemukan bahwa *green innovation* dapat berdampak negatif terhadap SDGs jika tidak didukung kemajuan teknologi yang memadai atau terjadi *trade-off* dengan faktor ekonomi. Sementara Ni et al. (2023) dan Alnafrah (2025) menegaskan bahwa

green innovation tidak selalu efektif tanpa dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai.

Material Flow Cost Accounting (MFCA) berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan mendorong keberlanjutan lingkungan serta ekonomi (Dahi & Abdullah, 2024). MFCA juga membantu perusahaan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan (Kokubu et al., 2023; Leiva et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Juliani et al. (2025), Nurhalimah & Rosdiana (2025), serta Sartika et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) mendukung pencapaian terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil serupa juga ditemukan oleh Maulana et al. (2024), Dewi (2025), dan Joel et al. (2025), yang menegaskan bahwa MFCA mendorong efisiensi biaya, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan perusahaan. Namun, tidak semua penelitian menemukan pengaruh signifikan. Nurkholisoh & Nurcholisah (2025) serta Arum & Farida (2023) melaporkan bahwa MFCA tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap SDGs, terutama jika implementasinya belum optimal.

Stakeholder pressure merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Alsayegh et al., 2023). Keterkaitan antara *stakeholder pressure* dan pencapaian SDGs sangat erat, karena SDGs menuntut keterlibatan aktif sektor bisnis dalam mengatasi tantangan (Nonet et al., 2022). Tekanan dari *stakeholder* mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola isu-isu keberlanjutan, serta menyesuaikan strategi bisnis agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Nonet et al., 2022; Pinheiro et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian menyebutkan bahwa *stakeholder pressure* yang berasal dari lingkungan, konsumen, media, serta investor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Alkurdi et al., 2024; Cahyani & Sujana, 2024; Choiriah &

Angelika, 2025; García-Sánchez et al., 2022; Giordino et al., 2024; Pratiwi & Sriani, 2025; Sriningsih & Wahyuningrum, 2022). Tekanan dari karyawan cenderung tidak signifikan, sementara tekanan pemerintah dan kreditur menunjukkan hasil yang bervariasi (Ardheta et al., 2025; Pustikaningsih et al., 2024). *Stakeholder pressure* dapat mempercepat adopsi praktik bisnis berkelanjutan dan integrasi SDGs ke dalam strategi perusahaan (Bello-Pintado et al., 2023; Rodaro et al., 2025), sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2025) yang menunjukkan bahwa *stakeholder pressure* berperan dalam mendorong peningkatan praktik keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dengan adanya hasil *research gap* di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Environmental Performance*, *Green Innovation*, *Material Flow Cost Accounting*, dan *Stakeholder Pressure* terhadap Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*?
2. Apakah *green innovation* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*?
3. Apakah *material flow cost accounting* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*?
4. Apakah *stakeholder pressure* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh fakta secara empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh *environmental performance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*.
2. Pengaruh *green innovation* terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*.
3. Pengaruh *material flow cost accounting* terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*.
4. Pengaruh *stakeholder pressure* terhadap kualitas pengungkapan *sustainable development goals*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sosial dan lingkungan, serta memperdalam wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada sektor perindustrian.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak diantaranya:

   1) Bagi Perusahaan

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait pengungkapan SDGs, khususnya pada pengelolaan *environmental performance*, penerapan *green innovation*, implementasi *material flow cost accounting*, dan pengelolaan *stakeholder pressure*.

   2) Bagi Regulator

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung SDGs.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan analisis terkait pengungkapan SDGs pada sektor perindustrian serta menjadi referensi untuk melakukan penelitian lanjutan, termasuk pengujian variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengungkapan SDGs.